

## **Manajemen Kolaborasi Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan Pada PLBN Sota**

**Oleh:**

**<sup>1</sup>Hesty Tambajong; <sup>2</sup>Hubertus Oja; <sup>3</sup>Yuyun Meisaroh**

<sup>1,2,3,4</sup>Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Musamus Merauke

Email: [tambajong@unmus.ac.id](mailto:tambajong@unmus.ac.id)

### **Abstrak**

Wilayah perbatasan merupakan beranda depan Negara, karena wilayah perbatasan merupakan wilayah yang berhadapan dengan negara lain. Di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di Distrik Sota merupakan distrik yang berbatasan langsung dengan negara Papua New Guinea. Manajemen kolaborasi pemangku kepentingan menjadi hal yang penting dalam pengelolaan wilayah perbatasan, terutama dalam wilayah yang memiliki beragam dinamika seperti Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota di Kabupaten Merauke. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan PLBN Sota. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di wilayah perbatasan Distrik Sota terdapat permasalahan seperti pelintas batas yang tidak memiliki izin, penyelundupan BBM, dan juga penyelundupan tanaman ganja yang membutuhkan kolaborasi antar pemangku kepentingan agar meminimalisir tindakan ilegal.

**Kata kunci : Manajemen Kolaborasi, Wilayah Perbatasan.**

### **Abstract**

*Border areas are the front porch of the State, because border areas are areas that face other countries. In South Papua Province, specifically Sota District, which is a district that borders directly with the country of Papua New Guinea. Stakeholder collaborative management is important in managing border areas, especially in areas that have various dynamics such as the Sota State Border Crossing Post (PLBN) in Merauke Regency. This research aims to analyze collaboration between various stakeholders in the management of PLBN Sota. This research uses qualitative methods to analyze data obtained through interviews, observation, documentation and literature study. The results of the research show that in the border area of Sota District there are problems such as unauthorized border crossers, fuel smuggling, and also marijuana plant smuggling which require collaboration between stakeholders to minimize illegal actions.*

**Keywords: Collaboration Management, Border Areas**

### **PENDAHULUAN**

Kabupaten Merauke menjadi salah satu daerah di Papua yang berbatasan langsung dengan Negara Papua Nugini. Seperti halnya wilayah perbatasan yang ada di Kabupaten Merauke yaitu Distrik Sota. Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) telah selesai dikerjakan dan di resmikan Presiden pada tanggal 3 Oktober 2021 dengan harapan bahwa kawasan perbatasan merupakan beranda terdepan Indonesia yang mewakili wajah bangsa agar bisa menjadi representasi kemajuan Indonesia. PLBN Sota di Merauke ini dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pembangunan PLBN tidak hanya bertujuan untuk pos lintas batas negara, lebih dari itu juga akan didorong

menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, salah satunya dengan dibangunnya pasar.

Di Indonesia, salah satu wilayah perbatasan yang menonjol adalah Perbatasan Negara Republik Indonesia-Papua Nugini, khususnya di Kabupaten Merauke. Dalam hal ini, manajemen wilayah perbatasan adalah alat penting yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur dan mengontrol pergerakan orang dan barang melintasi wilayah perbatasan. Namun, terlepas dari pentingnya pengelolaan wilayah perbatasan, banyak negara menghadapi beberapa tantangan dalam menerapkan dan menegakkannya. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi di wilayah perbatasan, manajemen kolaboratif pemangku kepentingan muncul sebagai pendekatan yang diharapkan dapat memperbaiki koordinasi dan efektivitas dalam pengelolaan wilayah perbatasan.

PLBN Sota berfungsi sebagai pintu keluar masuk dari dan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang untuk mengangkat kewibawaan, harkat, dan martabat bangsa di kawasan perbatasan negara. Sebagaimana fungsi PLBN sesuai nawa cita Presiden yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Selain itu, sistem pengelolaan kawasan perbatasan yang lebih terintegrasi agar disiapkan, sehingga kawasan disekitar PLBN dapat dikembangkan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa masih tingginya angka pelintas batas yang tidak memiliki surat jalan, dan juga ditemukan penyelundupan BBM yang dibawa dari Indonesia ke Papua Nugini, serta terindikasi penyelundupan tanaman ganja yang dibawa oleh negara tetangga. Oleh karena itu, kolaborasi antara pihak-pihak terkait, seperti petugas PLBN (Pos Lintas Batas Negara) dan Bea Cukai, dilakukan untuk meminimalisir berbagai permasalahan ini. Kolaborasi antar pemangku kepentingan tersebut memungkinkan warga PNG untuk membawa BBM ke negaranya dengan tetap mematuhi peraturan yang ada seperti dibatasi satu orang 10 liter. Lalu pihak TNI telah mengamankan pelaku penyelundupan tanaman ganja, dan pihak PLBN bagian imigrasi juga telah berupaya untuk membuatkan surat jalan kepada pelintas batas. Mengingat penduduk di negara tetangga yang sulit untuk mendapatkan surat jalan dikarenakan fasilitas negara nya yang tidak memadai.

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muzwardi (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Jejaring Sosial Untuk Manajemen Pengelolaan Perbatasan Antara Negara”. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat berbagai permasalahan di tengah-tengah masyarakat perbatasan Kepulauan Riau mulai dari penyelundupan barang baik yang baru maupun yang bekas, hingga penyelundupan barang mewah dan bahkan narkotika. Dalam hal ini belum terjadi sinergi apalagi kolaborasi yang baik antara Badan Nasional Pengelola Perbatasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di masing-masing Kabupaten/Kota. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah membahas tentang kolaborasi antar stakeholder dalam pengelolaan wilayah perbatasan terkait dengan permasalahan penyelundupan barang.

Pemasalahan tersebut memerlukan pengelolaan secara kolaboratif, yang melibatkan berbagai stakeholder. Hal ini mendasari penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul:

Manajemen Kolaborasi Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan (Studi pada PLBN Sota Merauke)”. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi manajemen kolaboratif pemangku kepentingan dalam pengelolaan wilayah perbatasan, dengan fokus khusus pada Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota yang terletak di Kabupaten Merauke, Papua. PLBN Sota menjadi titik penting dalam hubungan antarnegara Indonesia-Papua Nugini, sehingga pengelolaannya membutuhkan pendekatan yang cermat dan terkoordinasi.

Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menggali persepsi, praktik, dan tantangan yang dihadapi oleh pemangku kepentingan dalam upaya kolaboratif mereka untuk mengelola PLBN Sota. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan dalam meningkatkan manajemen wilayah perbatasan, dan memperkuat kerjasama lintas sektor dan lintas batas yang semakin kompleks dan dinamis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan memberikan kontribusi terhadap pemahaman teoritis tentang manajemen kolaboratif dan pengelolaan wilayah perbatasan, tetapi juga akan memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah perbatasan.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan analisa data secara deskriptif. Metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2014). Adapun teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, studi pustaka, dokumentasi dan perekaman. Dalam teknik pengumpulan data ini, peneliti menggunakan teknik wawancara sehingga lebih banyak mengindahkan apa yang disampaikan oleh narasumber dan hanya terdiri atas garis-garis besar permasalahan guna mendapatkan informasi awal terkait berbagai isu atau kasus permasalahan yang terdapat pada objek penelitian, kemudian peneliti dapat menentukan secara pasti terhadap suatu permasalahan yang harus diteliti dan melakukan wawancara kepada pihak-pihak atau narasumber yang mewakili dan memiliki wewenang dalam tingkatan yang terdapat pada objek penelitian, sehingga peneliti akan memperoleh deskripsi atau data yang lebih lengkap.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Hayati, 2019). Sementara menurut Gulati, Mayo, & Nohria manajemen adalah tindakan bekerja melalui sekelompok orang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan dengan cara yang efisien dan efektif (Gulati, Mayo, & Nohria, 2017). Fungsi manajemen pada umumnya dibagi menjadi empat fungsi yaitu fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dengan tujuan mencapai hasil yang dinginkan secara efektif dan efisien (Amirullah, 2015:8). Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah koordinasi semua sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penetapan tenaga kerja, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Kolaborasi adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing. Jonathan mendefinisikan kolaborasi sebagai proses interaksi diantara beberapa orang yang berkesinambungan (Jonathan, 2004). Kata kolaborasi sering kali digunakan untuk menjelaskan proses penyelesaian pekerjaan yang bersifat lintas batas, lintas sektor, lintas hubungan, lintas organisasi bahkan lintas negara sekalipun (O'Leary, 2010). Manajemen kolaborasi adalah sub konsep manajemen yang berorientasi pada efektivitas dan efisiensi. Dengan dalil tersebut, Johnson, Kast dan Rosenzweig (2002) mengetengahkan pentingnya kolaborasi sebagai jalan keluar dalam implementasi kebijakan program organisasi. Dengan demikian, penulis menyimpulkan manajemen kolaborasi dalam pengelolaan wilayah perbatasan berfokus pada kerjasama dan keterlibatan bersama antara berbagai pihak, termasuk pihak PLBN, pegawai imigrasi dan pihak berwenang.

Dalam hal ini, manajemen kolaborasi dianggap sebagai suatu strategi yang memungkinkan organisasi untuk memanfaatkan sumber daya dan keahlian yang ada secara efektif melalui kerja sama yang erat dan terintegrasi serta mengetengahkan pentingnya kolaborasi sebagai jalan keluar dalam implementasi kebijakan program organisasi. Stakeholder adalah kelompok atau individu yang memiliki kepentingan dalam kegiatan, hasil organisasi dan kepada siapa organisasi tersebut untuk pencapaian tujuan perusahaan (Phillips, 2019). Senada dengan pendapat tersebut, menurut Freeman dan McVea stakeholder adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi (Freeman dan McVea, 2001).

Dalam pengelolaan wilayah perbatasan ini, fungsi stakeholder adalah seberapa besar fungsinya dan realita perannya dalam pemanfaatan serta pengelolaan PLBN Sota. Untuk itu, dalam mengelola wilayah perbatasan diperlukan kolaborasi dalam pengelolaan (collaborative management). Karena melihat berbagai permasalahan di wilayah perbatasan ini seperti pelanggaran pelintas batas negara yang memasuki wilayah negara tanpa izin karena adanya jalur tikus. Kemudian adanya penyelundupan tanaman ganja, ini dapat terjadi karena tanaman ganja dengan mudah tumbuh di negara tetangga secara alamiah. Berbagai permasalahan tersebut dapat diuraikan dengan menggunakan indikator keterampilan kolaborasi.

Keterampilan kolaborasi adalah kemampuan yang saling bekerja sama dengan efektif serta bersikap menghargai anggota kelompoknya yang tersusun heterogen, melatihkan kelancaran dan partisipasi saat mendiskusikan keputusan agar tercapai tujuan bersamanya Greenstein (Redhana, 2019). Untuk melihat manajemen kolaborasi dalam pengelolaan wilayah perbatasan di PLBN Sota, dideskripsikan berdasarkan indikator keterampilan kolaborasi menurut Greenstein, 2012 (dalam Dhitarifa, 2023) diantaranya (1) berpartisipasi secara aktif; (2) bekerja secara produktif; (3) bertanggung jawab; (4) fleksibilitas dan kompromi; (5) saling menghargai antar anggota kelompok.

### **Berpartisipasi secara aktif**

Partisipasi diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu (Andriani, 2018). Berpartisipasi secara aktif mengacu pada

tindakan individu atau kelompok dalam suatu konteks yang menunjukkan keterlibatan yang kuat, antusiasme, dan kontribusi yang berarti dalam suatu kegiatan, proses, atau inisiatif tertentu. Ini mencerminkan sikap proaktif dan kontributif seseorang atau kelompok dalam mencapai tujuan bersama atau memajukan suatu tujuan tertentu. Seperti partisipasi dalam pertemuan dan diskusi, koordinasi antar pihak, memberikan ide dan masukan.

Partisipasi antar pemangku kepentingan di PLBN Sota, dari hasil wawancara bahwa dari pihak PLBN dan pihak lainnya seperti bagian imigrasi, beacukai, dan karantina kesehatan sudah berpartisipasi menunjukkan keterlibatan yang kompak dan berkesinambungan saling berkoordinasi, para pemangku kepentingan memberikan laporan terkait tupoksi mereka sesuai pada bidang masing-masing kepada pihak PLBN untuk dilaporkan ke pusat mengenai aktivitas masyarakat yang melewati PLBN seperti membawa barang masuk berupa daging, barang belanjaan, dan data pelintas, semua itu di rekap dan dikirim melalui aplikasi online kepada kementerian pusat. Sesuai dengan yang kemukakan oleh Huneryear dan Heoman dalam (Siti Irene, 2011) terkait partisipasi adalah sebagai keterlibatan mental dan emosional dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggungjawab secara bersama.

### **Bekerja secara produktif**

Produktivitas kerja merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk menghasilkan barang dan jasa dalam waktu tertentu yang telah ditentukan atau sesuai dengan rencana (Sinungan dalam Busro, 2018:344). Bekerja secara produktif adalah kemampuan individu atau kelompok untuk melakukan tugas atau aktivitas dengan efisien dan efektif guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum, indikator ini mencerminkan tingkat kinerja dan kontribusi yang efektif dalam mencapai hasil yang diinginkan. Seperti pencapaian tujuan bersama, komunikasi yang terbuka, dan efisiensi kerja. Para stakeholder dalam PLBN Sota, sudah menjalankan kinerja secara efektif dapat di lihat dari kerja sama mereka dalam menjalankan tugas mengawasi, atau mendata barang atau data pelintas, mereka mengirim data ke pusat dengan tepat waktu, dari berbagai bidang sudah menjalankan peran nya masing-masing.

Bekerja sama secara produktif ditunjukkan Ketika salah satu masyarakat yang berasal dari Negara PNG mengalami sakit, PLBN Sota yang terdiri dari beberapa pemangku kebijakan secara cepat merespon dengan memberi bantuan kesehatan dengan tidak melupakan SOP, hal ini dilakukan karena fasilitas Kesehatan tidak memadai di wilayah pemukiman masyarakat Negara PNG yang berada di dekat PLBN Sota.

Para stakeholder dalam PLBN Sota sudah menjalankan SOP mereka dengan baik mulai dari memeriksa identitas para penyebrang, kemudian mengecek barang bawaan dengan x-ray, memastikan tidak ada yang sakit, mendata para pelintas, dan lain-lain. Para Pihak PLBN Sota mendapatkan beberapa masalah seperti adanya pelintas yang tidak memiliki surat izin melintas secara resmi kemudian adanya masalah tentang penyelundupan barang ilegal yaitu ganja dan BBM yang diselundupkan secara ilegal. Dalam hal ini, para pemangku kepentingan telah berupaya untuk mengamankan pelaku dan siap beroperasi dalam kondisi darurat perbatasan. Produktifitas kerja para stakeholder PLBN Sota merupakan sikap mental dalam melakukan pekerjaan secara dan lebih baik dari hari

kemarin dan hari esok (Sutrisno, 2017)

### **Bertanggung jawab**

Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Orang yang bertanggung jawab cenderung dapat melaksanakan tugas dengan baik (Alex Nitisemo, 2016). Tanggung jawab juga berarti perbuatan sebagai wujud dari kesadaran akan kewajibannya. Bertanggung jawab yaitu perilaku individu atau kelompok yang menunjukkan kesediaan dan kemampuan untuk mengakui, menerima, dan menjalankan kewajiban atau tanggung jawab mereka terhadap tugas, keputusan, atau hasil tertentu. Dalam konteks manajemen atau organisasi, indikator ini mencerminkan komitmen untuk bertindak sesuai dengan norma, aturan, dan standar yang berlaku, serta mengambil tanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan atau keputusan yang diambil.

PLBN Sota berfungsi sebagai gerbang utama dalam hubungan antarnegara, serta siap beroperasi dalam kondisi darurat perbatasan. Tanggung jawab dalam pengelolaan keamanan negara sangat penting untuk meningkatkan keamanan wilayah perbatasan dan keselamatan negara secara keseluruhan. Pemangku kepentingan yang berkerja di wilayah PLBN Sota sudah bertanggung jawab atas tugas mereka pada wilayah PLBN dengan memastikan bangunan, listrik atau air selalu ada guna membantu melancarkan aktivitas dalam mengawasi dan mendata barang dan data pelintas PLBN. PLBN Sota telah melakukan tanggung jawab sesuai dengan SOP mulai dari kesehatan karantina yang dimana mereka memberikan fasilitas untuk para pelintas jika terjadi sakit atau masalah kesehatan lainnya, kemudian TNI dan POLRI yang dimana telah bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing institusi. Tanggung jawab adalah suatu kewajiban untuk melakukan atau menyelesaikan tugas yang harus di penuhi, memiliki konsenkuensi hukuman terhadap kegagalan, dan mengerjakan tugas sebaik mungkin, tidak menyalahkan pihak lain bila terjadi kesalahan dalam melakukan tugas yang diemban dan tanggung jawab juga adalah kesadaran dalam menyelesaikan tugas dalam hal apapun (dkk, April 2022)

### **Fleksibilitas dan kompromi**

Fleksibilitas adalah kemampuan beradaptasi terhadap adanya perubahan lingkungan saat itu (Altindag & Siller, 2014). Sementara itu menurut Joko Untoro, kompromi adalah bentuk penyelesaian masalah sosial melalui akomodasi yang bermaksud untuk mendapatkan kesepakatan atas perselisihan yang telah terjadi. Fleksibilitas dan kompromi mengacu pada kemampuan individu atau kelompok untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, mengatasi perbedaan, dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dalam kerangka kerja kolaboratif. Ini adalah aspek kunci dalam membangun hubungan kerja yang kuat dan efektif di antara berbagai pihak yang terlibat dalam suatu proyek atau inisiatif kolaboratif. Hal ini membutuhkan empati, pengertian, dan kemauan untuk bekerja menuju penyelesaian yang saling menguntungkan.

Para stakeholder telah menyesuaikan dengan wilayah Di PLBN dan sekitarnya dari awal terbentuknya PLBN, walaupun awal berdirinya PLBN sempat terjadi penolakan oleh masyarakat setempat karena adanya pembatasan sesuai dengan aturan akan tetapi dengan

adanya kolaborasi para pihak pemangku kepentingan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait fungsi dari PLBN sebagai batas negara yang harus dijaga sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Pentingnya peran PLBN Sota sebagai pusat pelayanan perlintasan batas yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan wajah Indonesia di tapal batas negara merupakan kemampuan para stakeholder PLBN Sota untuk dapat bekerja sama secara formal maupun informal dengan memfasilitasi setiap pekerjaan berdasarkan kebijakan kerja, waktu kerja dan tempat untuk bekerja (Fatkhul Huda, 2023)

**Saling menghargai antar anggota kelompok**

Poerwadaminta menjelaskan bahwa menghargai yaitu setiap orang harus menghormati, mengindahkan, memuliakan dan menjunjung tinggi pendapat dan keyakinan orang lain (Poerwadaminta, 2007:406). Sementara menurut Elfindri menjelaskan bahwa karakter seseorang yang suka menghargai orang lain terbangun dari sifatnya yang mau memikirkan kepentingan orang lain, memiliki rasa pengakuan atas karya, ide, serta kontribusi orang lain (Elfindri, 2012:101). Kelompok menurut N. Nazsir ialah kumpulan dari dua orang atau lebih banyak yang melakukan suatu interaksi baik secara fisik maupun psikologis secara terus menerus dalam kurun waktu tertentu (N. Nazsir, 2008). Saling menghargai antar anggota kelompok dalam manajemen kolaborasi merujuk pada sikap, perilaku, dan budaya di antara anggota kelompok yang menunjukkan penghargaan, penghormatan, dan pemahaman terhadap keberagaman, kontribusi, dan peran masing-masing individu dalam mencapai tujuan bersama.

Aspek kritis dalam membangun lingkungan kerja yang inklusif, mendukung, dan produktif dalam konteks kerjasama. Peningkatan pelayanan di PLBN Sota juga menunjukkan bahwa antar pemangku kepentingan bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pelayanan di kawasan perbatasan. Hal ini mencakup perlintasan orang, barang, ataupun membawa hewan peliharaan dan tanduk rusa serta memberikan pelayanan perlintasan yang terbaik untuk masyarakat dalam hal ini mengusahakan agar pelintas tidak melewati jalan tikus tetapi harus melewati PLBN agar bisa di cek data-data dari pelintas oleh pihak PLBN, dan dari pihak PLBN sudah saling menghargai perannya masing-masing guna memajukan tujuan bersama. Kegiatan lintas batas sering terjadi ancaman kerawanan tindak pidana akibat arus barang, layanan dan orang ke dan dari Indonesia dan negara-negara tetangga (Maisondra, 2023). Sinergitas TNI POLRI dan BNPP dalam menjaga keamanan dan ketertiban perbatasan Sota dengan menutup akses-akses jalan pelintas batas illegal sehingga terus meminimalisir Tindakan-tindakan pelintas batas yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

**KESIMPULAN**

Manajemen kolaborasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan wilayah perbatasan, studi kasus pada PLBN Sota di Kabupaten Merauke dapat dilihat dari lima indikator yang diselesaikan sebagai berikut: (1) berpartisipasi secara aktif, para pemangku kepentingan sudah berpartisipasi menunjukkan keterlibatan dan berkesinambungan saling berkoordinasi, (2) bekerja secara produktif, dalam hal kinerja para stakeholder sudah menjalankan dengan baik di lihat dari kerja sama mereka dalam menjalankan tugas mengawasi dan mendata barang atau data pelintas, (3) bertanggung jawab, pemangku

kepentingan sudah bertanggung jawab atas tugas mereka pada wilayah PLBN mereka memastikan bangunan, listrik atau air selalu ada untuk di butuhkan guna membantu melancarkan aktivitas mereka dalam mengawasi dan mendata barang dan data pelintas PLBN serta TNI dan POLRI telah mereka bekerja sama untuk menjaga di pos-pos keamanan. Kemudian indikator selanjutnya, (4) fleksibilitas dan kompromi, stakeholder telah memberikan edukasi kepada masyarakat untuk dapat memahami fungsi dari PLBN, dan pada akhirnya masyarakat pun dapat mengerti dan menerima dengan adanya PLBN. Serta tersebut, (5) saling menghargai antar anggota kelompok, dari pihak PLBN sudah saling menghargai perannya masing-masing guna memajukan tujuan bersama dalam pengelolaan wilayah perbatasan. Melalui kolaborasi ini potensi tindakan ilegal dapat dikelola dengan lebih baik, mudah untuk saling bertukar informasi karena berbagai pihak telah melakukan tupoksinya, dan akhirnya kepentingan bersama dapat diwujudkan. Jurnal ini memberikan kajian akan pentingnya kolaborasi dalam pengelolaan wilayah perbatasan dapat dilihat dari kerjasama antara berbagai pihak terkait, seperti pihak PLBN, karantina kesehatan, beacukai, TNI, dan Polri.

Untuk meningkatkan manajemen kolaborasi pemangku kepentingan di PLBN Sota, solusi yang ditawarkan oleh penulis yaitu diperlukan peningkatan koordinasi melalui pertemuan rutin dan forum komunikasi terbuka. Jurnal ini memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama mengenai masalah yang dihadapi serta langkah-langkah yang perlu diambil. Para stakeholder harus lebih memastikan koordinasi yang baik dengan pihak berwenang antara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), untuk mengurangi permasalahan penyeludupan BBM dan pelintas batas yang tidak memiliki surat izin jalan. Dan pihak berwajib harus mengambil tindakan tegas terhadap penyeludupan dengan memberikan sanksi kepada mereka yang terbukti melakukan aktivitas ilegal. Pemerintah harus ikut serta dalam meningkatkan pengembangan infrastruktur di wilayah perbatasan PLBN Sota, seperti pos keamanan di beberapa titik untuk memudahkan pengawasan dan menghambat kegiatan penyeludupan. Dan membangun kerjasama dengan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam menghambat kegiatan penyeludupan. Selain itu, pengembangan prosedur operasi standar (SOP) bersama yang jelas sangat diperlukan untuk memperkuat keselarasan tindakan antar pihak, sehingga dapat mengurangi tumpang tindih tugas dan meningkatkan efisiensi operasional. SOP ini sebaiknya disusun dengan melibatkan semua pemangku kepentingan agar setiap pihak merasa memiliki dan berkomitmen untuk mematuhiinya.

**DAFTAR PUSTAKA:**

- Choirul, Saleh. 2020. "Konsep, Pengertian, dan Tujuan Kolaborasi." *Dapu6107* 1: 7–8.
- Dahlan, and Muhammad Darwis. 2017. "Prinsip Manajemen Kolaborasi Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Makassar." *Jurnal Ad'ministrare* 4(1): 41.
- Dhitasarifa, I, A D Yuliatun, and Erna Noor Savitri. 2023. "Penerapan Model Problem Based Learning Untuk Meningkatkan Keterampilan Kolaborasi Peserta Didik Pada Materi Ekologi Di SMP Negeri 8 Semarang." *Seminar Nasional IPA*: 684–94.
- Hapsari, Windy. 2016. "Pelintas Batas Papua New Guinea Di Kampung Sota, Merauke

- Papua New Guinea'S Border Crossers At Kampong Sota, Merauke." *Walasuji* 7(1): 257–69.
- Irawan Andri, and Aenal Fuad Adam. 2023. "Collaborative Governance Dalam Pembangunan Masyarakat Perbatasan Di Kabupaten Merauke." *Musamus Journal of Public Administration* 5(2): 421–28.
- Maisondra, Maisondra. 2023. "Pembangunan Kawasan Pos Lintas Batas Negara (Plbn) Dan Dampaknya Terhadap Kebijakan Keamanan Nasional." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa* 8(2): 210–25.
- Moleong, Lexy J. (2007), Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muzwardi Ady, Adji Suradji Muhammad, Rolly Maulana Awangga, and Arjuna Rizaldi. 2020. "Analisis Jejaring Sosial Untuk Manajemen Pengelolaan Perbatasan Antara Negara." *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi* 8(2): 168–87.
- Nadjib, Mochammad. 2016. "Problematika Prinsip Manajemen Kolaboratif dalam Kerangka Penyelamatan Danau Rawapening." *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 18(3): 487–502.
- Rachmandani, Resky Eka. 2020. "Pengaruh Dan Strategi Manajemen Kolaborasi Masyarakat Dan Pemerintah Tahun 2019 (Pengembangan Goa Kiskendo Jatimulyo, Kulonprogo)." *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)* 1(2): Layouting.
- Tofani, Ivan, Tiuridah Silitonga, Yurika Afrianita, and Tesiherdawati. 2022. "Kebijakan Pengelolaan Wilayah Perbatasan dan Tantangannya Studi Komparasi Wilayah Perbatasan Australia, Laos, dan Indonesia." *Jurnal Pelita Kota* 3(2): 189–206.
- Wahyuni, Suci. 2022. "Manajemen Kolaborasi Antara Guru Dengan Peserta Didik Pada Kegiatan Belajar Mengajar Era New Normal Di Smp Negeri 1 Lhoksukon Aceh Utara." *Al-Madaris Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman* 3(2): 21–30.